

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian menjadi salah satu sektor penting dalam penopang perekonomian negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan data Badan Pusat Statistik (2023) yang mencatat jumlah petani sekitar 28,1 juta atau 29,36% dari keseluruhan tenaga kerja di Indonesia. Artinya, sektor pertanian juga menjadi penopang kehidupan banyak keluarga yang ada di Indonesia. Lahan pertanian di Indonesia sangatlah luas meliputi sub sektor tanaman pangan maupun perkebunan. Dengan luasnya lahan pertanian ditambah dengan kualitas kesuburuan tanah yang baik, Indonesia mampu menghasilkan berbagai jenis komoditas pertanian sebagai sumber pangan utama serta di ekspor untuk menambah devisa negara. Menurut Aprilia dan Salsabila (2021), Dari segi geografis, Indonesia terletak di kawasan khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis sehingga mendapatkan intensitas penyinaran sinar matahari yang kuat sepanjang tahun, hal tersebut membuat pertumbuhan tanaman dapat berjalan dengan baik. Curah hujan di Indonesia juga tinggi dan terjadi sepanjang tahun sehingga dapat membantu tanaman untuk memenuhi kebutuhan air. Suhariyanto (2024) menambahkan bahwa banyaknya aktivitas vulkanik juga membuat tanah di Indonesia menjadi subur karena pupuk alami dari abu vulkanik.

Meskipun didukung dengan posisi geografis yang sangat baik, hal tersebut tidak cukup untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik serta kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia khususnya para masyarakat tani. Maka, peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian sangatlah penting. Pembangunan pertanian merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, pendapatan petani, dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini (Wijaya dan Salahudin, 2023). Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan

kebijakan ataupun yang mendukung pengembangan sektor pertanian. Selain kebijakan dan regulasi, pemerintah harus mendukung pengembangan pertanian berupa pembiayaan, infrastruktur pertanian, teknologi pertanian, pelatihan dan penyediaan faktor pertanian yang berkaitan dengan pupuk dan bibit berkualitas.

Dalam melakukan pembangunan pertanian, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri, akan lebih efektif dan efisien jika kebijakan selaras dengan pemerintahan daerah baik tingkat provinsi sampai ke desa. Mayoritas pertanian berada di wilayah desa sehingga pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam melaksanakan kebijakan pertanian. Agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat desa serta memberi kebebasan pada desa untuk mengoptimalkan potensi yang terdapat di desa, maka pemerintah meluncurkan program desa mandiri.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadi dasar dalam program desa mandiri. Pada Undang undang tersebut disebutkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan memperhatikan kemandirian, keanekaragaman, dan keberagaman. Desa juga berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan potensi ekonomi, sumber daya alam dan manusia di wilayah desa. Pengelolaan dana desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk mencapai kemandirian desa. Desa mengatur pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat berperan dalam pengelolaan ekonomi desa untuk mendukung kemandirian desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, desa mandiri merupakan status yang diberikan kepada desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan

ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa yang telah mendapat status desa mandiri. Desa ini terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta. Potensi yang lebih menonjol di desa ini ialah kebudayaan dan wisata. Melihat dari website resmi pemerintah Desa Panggungharjo, potensi kebudayaan dan wisata yang ada adalah rumah produksi gamelan, rumah produksi wayang, seni rupa, adanya sanggar tari, bregada keprajuritan, grup sholawat jawi, sanggar teatrikal, sanggar jathilan dan terdapat juga wisata kuliner yang berada di desa tersebut seperti Mangut Lele Mbok Marto Ijoys, Waroeng Pohon, Tengkleng Bhenjoyo, Kopi Wawasima, dll.

Jumlah penduduk di Desa Panggungharjo adalah 28.564 jiwa. Masyarakat yang bekerja sebagai petani/buruh tani yaitu sebanyak 2.539 jiwa, jumlah tersebut terbanyak ketiga setelah wiraswasta sebanyak 3.685 jiwa dan karyawan swasta 3.584 jiwa.

Tabel 1.1 Sebaran Pekerjaan di Desa Panggungharjo

| Pekerjaan | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---------------------|----------------|----------------|
| Pelajar/Mahasiswa | 5.334 | 19 |
| Belum/tidak bekerja | 4.632 | 16 |
| Karyawan swasta | 3.685 | 13 |
| Wiraswasta | 3.584 | 13 |
| Petani/buruh tani | 2.539 | 9 |
| Ibu rumah tangga | 2.364 | 8 |
| Buruh harian lepas | 2.021 | 7 |
| Pekerjaan lain | 4.405 | 15 |
| Total | 28.564 | 100 |

Sumber: Pemerintah Kalurahan Panggungharjo (2021).

Masih banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani/buruh tani yaitu 9% dari total penduduk, maka perlu adanya keberpihakan dari pemerintah desa terhadap sektor pertanian, ditambah status desa mandiri yang didapat maka desa harus melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan memperhatikan kemandirian, keanekaragaman, dan keberagaman serta dapat memenuhi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat penerapan program desa mandiri di Desa Panggungharjo?
2. Bagaimana tingkat pengembangan pertanian di Desa Panggungharjo?
3. Bagaimana hubungan program desa mandiri dan pengembangan pertanian di Desa Panggungharjo

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat penerapan program desa mandiri di Desa Panggungharjo
2. Mengetahui tingkat pengembangan pertanian di Desa Panggungharjo
3. Mengetahui hubungan program desa mandiri dan pengembangan pertanian di Desa Panggungharjo

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, sebagai salah satu syarat peneliti dalam menyelesaikan studi strata satu di Instiper Yogyakarta.
2. Bagi Pembaca, sebagai sumber informasi maupun referensi untuk penelitian lebih lanjut.
3. Bagi pemerintah Desa Panggungharjo, sebagai sumber informasi maupun referensi dalam menentukan program yang tepat di sektor pertanian.